

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

M. Subari

STAI Pancawahana Bangil

**Abstract:** *The problem of poverty is a structural and multidimensional problem including social politics, asset economics and others. That which complicates or makes poverty alleviated is that it is not only multi-dimensional but also interlocking, dynamics, complexes, conditions with a gender (social corollary) institutional system and location-specific events. To deal with the problem of poverty must know the root of the problem, and must have a strategy in poverty alleviation in the community. Namely there must be a professional field facilitator and expert in the field of community empowerment, have knowledge of qualified Islamic religion, and entrepreneurship. It is these facilitators who facilitate and assist from the beginning to the end of the poverty alleviation stage at the village / kelurahan level. A poor person mentally falls in the middle of society, the companion in the field is the one who raises his mentality to have an awareness, critical that they must rise from adversity in the community, by motivating the teachings of Islamic teachings contained in the Qur'an Ar Ra'du verse 11 verse it means "Verily Allah SWT does not change the state of things of a people, so they change the conditions that exist in themselves". Armed with the critical awareness capital they have, their souls rise to change their destiny, change their mindset to become hard workers, and entrepreneurs, so that they can elevate their dignity and status*

**Keywords:** *Strategy, countermeasures, Islamic perspective*

### PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal terutama pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal 28 ayat 3 “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”<sup>1</sup> hal ini sesuai dengan Proklamasi pada tahun 1997 sampai 2006 sebagai dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

---

<sup>1</sup> Deputi Koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Informasi dasar penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, (Jakarta, April, 2003), hlm. 1-2

pemberantasan kemiskinan dengan tema “Pemberantasan Kemiskinan Merupakan Tugas, Etik, Sosial, dan Ekonomi dari kemanusiaan yang mendesak”.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, asset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuknya, antara lain:

1. Dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut siri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.
2. Dimensi sosial dan pendidikan sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikan budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka. Dan rendahnya pendidikan mereka, dan kebodohan.
3. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
4. Dimensi asset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk fase kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal, dan sebagainya.<sup>3</sup> Bahwa yang menyulitkan atau membuat kemiskinan itu sulit ditanggulangi adalah sifatnya yang tidak saja multidimensional tetapi juga saling mengunci, dinamika, kompleks, sarat dengan sistem institusi (consensus sosial) gender dan peristiwa yang khas perlokasi.<sup>4</sup>

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut diatas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan public di tingkat lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud juga dititikberatkan pada upaya pengokohan perannya sebagai motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di desa dan kelurahan mereka, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam lingkungan kemiskinan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Dicky Djatmika, *jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, MAP UNDP, hlm. 2

<sup>3</sup> DIrektorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, *Pedoman Umum P2KP II Cetakan Pertama*, TS, 2002, hlm. 1-2

<sup>4</sup> Deepa Narayan, dkk, *Voices of the Poor*, (Jakarta), hlm. 8

<sup>5</sup> PNPM – MP – 4, *Pelatihan Dasar BKM Tahun ke 4*, hlm. 19

Nilai-nilai yang utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan adalah: 1) Dapat dipercaya/ Amanah 2) Ikhlas/ relawan 3) Kejujuran 4) Keadilan 5) Kesetaraan 6) Kebersamaan dalam keragaman.<sup>6</sup> Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional dan structural. Khususnya yang terkait dengan dimensi pendidikan, ekonomi serta dalam jangka panjang mampu menyediakan asset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Kepada organisasi masyarakat warga yang dibangun oleh dan untuk rakyat. Selanjutnya dipercaya untuk mengelola dana abadi penanggulangan kemiskinan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan baik berbentuk kredit mikro maupun hibah untuk kegiatan yang bermanfaat oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Kemiskinan sebagai bentuk ancaman dan merupakan masalah besar yang telah ada sejak dulu sampai sekarang terutama bagi Negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Pertanyaannya maukah umat Islam menanggulangi kemiskinan dan maukah orang miskinnya itu untuk bergerak dan merubah nasib dari tidak berdaya menjadi berdaya.<sup>8</sup> Menurut mufasir AL Qur'an Muhammad Quraish Shihab melihat dari akar kata "miskin" berarti diam atau tidak bergerak, maka dapat diperoleh pesan, faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri enggan atau tidak mau bergerak dan berusaha.<sup>9</sup>

Keengganan berusaha adalah penganiayaan diri sendiri. Berarti tidak mau berubah dalam arti tidak mau merubah nasibnya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan Al Qur'an Surat Ar Ro'du ayat 11.

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Pedoman Umum P2KPII, (Jakarta, 2004), hlm. 14

<sup>7</sup> Pedoman P2KP II, hlm. 4

<sup>8</sup> Rohmim Dahuri, *Mewaspada! Desain Global PBNU*, (Jakarta, 2016), hlm. 16

<sup>9</sup> Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir AL Qur'an*, hlm. 382

Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kalau dirinya sendiri tidak ada upaya atau ikhtiar untuk merubah dirinya sendiri.<sup>10</sup> Sedangkan ketidakmampuan berusaha yang disebabkan orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan structural. Lebih jelas lagi, jaminan rizqi yang dijanjikan Allah SWT ditujukan untuk makhluk yang dinamakan dabbah, artinya bergerak. Hal ini sesuai dengan ayat Al Qur'an yang artinya "apa saja yang melatah diatas bumi rizqi dijamin Allah SWT"<sup>11</sup> Sesuai dengan ayat Al Qur'an Surat Hud ayat 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : *Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*

Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan ketidak berdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Ketidakberdayaan masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan masyarakat, bidang pendidikan sangat lemah, dibidang politik, dibidang ekonomi, tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, dikalangan masyarakat termarjinalkan di lingkungan masyarakat, umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir miskin. Hal ini banyak peringatan yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an Surat Al Ma'un ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya : *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.*<sup>12</sup>

Dalam Al Qur'an ditegaskan Surat Ad Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*<sup>13</sup>

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW "Kadzal Fakru An Yauma Kufron" kefakiran lebih mendekati kekufuran,<sup>14</sup> hadits tersebut setidaknya memiliki 3 makna

<sup>10</sup> Mushaf An-Nadhlah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Hati Mas), hlm. 368

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 521

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 521

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 521

<sup>14</sup> Sholeh Muslim, hlm. 276

sebagai berikut, *pertama* orang-orang miskin harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kemiskinannya, hal ini disebabkan keduanya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, sebagai peringatan kepada orang kaya-kaya bahwa kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorongnya kepada kekufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun kufur dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT. *Ketiga*, sebenarnya kemiskinan itu ada dua macam, kemiskinan material dan kemiskinan spiritual, yang dimaksud kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin harta benda duniawi, sedangkan kemiskinan spiritual adalah kurangnya iman dan jiwa sesuai dengan hadits Rasul yang artinya “kaya itu bukan lantaran banyak harta, tetapi kaya itu kaya jiwa”.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

Dalam menanggulangi masalah kemiskinan harus mengetahui dan memahami akar permasalahan kemiskinan dan harus mempunyai strategi dalam menanggulangi kemiskinan. Pada haikkatnya penggolongan kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pertama kemiskinan structural keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalkan pemerintahan yang otoriter dan meliteristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalela praktek korupsi kolosi dan nepotisme (KKN) kebijakan ekonomi yang tidak adil serta perekonomian dunia yang telah mengunungkan kelompok Negara tertentu. Kelompok yang kedua faktor kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah baik yang beraitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang mengitarinya, misalkan faktor ekstern kesuburan tanah dan bencana alam. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kemiskinan yang kultural atau keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu yang melekat pada kebudayaan masyarakat terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam kemiskinan masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu dan kurang berminat untuk berprestasi.<sup>16</sup>

Beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain: 1) pelaksanaan suatu kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin 2) Ekonomi dikuasai kelompok tertentu, terjadinya korupsi, kolosi, nepotesme (KKN) pada pemegang kebijakan<sup>17</sup> 3) Kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat enggan mengeluarkan zakatnya 4) Tidak ada pengelolaan zakat dan shodaqoh dari konsumtif menjadi produktif 5) Tidak ada kepedulian pihak lain untuk memberdayakan masyarakat miskin.<sup>18</sup>

Kriteria kemiskinan di Indonesia berbeda-beda, kriteria yang dikeluarkan BSP, BKKBN, DINKES sangat berbeda-beda. Apalagi kriteria kemiskinan yang disepakati

---

<sup>15</sup> Sholeh Buchari, hlm. 521

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotan (P2KP)

<sup>17</sup> Dirjen Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM – PM*, hlm. 12

<sup>18</sup> Juazi Syafi’I, *Zakat Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, hlm. 9

oleh masyarakat dikeluarkan atau yang ada program P2KP, PNPM nya tergantung kesepakatan masyarakat setempat yang disepakati dalam rembuk refleksi kemiskinan. Kriteria kemiskinan yang cocok sesuai dengan situasi dan kondisi adalah kriteria kemiskinan yang dikemukakan dalam agama Islam yang disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah Ayat 60 yang artinya "Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan".<sup>19</sup> Dalam ayat tersebut jelas bahwa kriteria kemiskinan yang pertama adalah orang fakir, baru yang kedua orang miskin karena orang fakir kondisinya lebih parah dari pada orang miskin. Kemudian kebutuhan pokok makanan sehari 1 Mut (6 Ons) hal ini sesuai dengan tebusan orang yang meninggalkan puasa Romadhon sehari harus memberikan makan orang miskin satu Mut (6 Ons) dan makan ikan daging seminggu 2 kali kalau kurang dari itu termasuk miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat menentukan keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan adalah harus ada pendamping di lapang yang profesional ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, mempunyai pengetahuan agama Islam yang mumpuni dan mempunyai pengetahuan *entrepreneurship*, dll. Pendampingan lapangan itulah yang memfasilitasi tahapan pelaksanaan awal sampai akhir penanggulangan kemiskinan berjalan berhasil memberdayakan masyarakat miskin.

Tahapan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang harus dipersiapkan adalah pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang anggotanya dari relawan-relawan yang mempunyai kepedulian dengan masalah kemiskinan dan yang menggerakkan orang fakir dan miskin. Strategi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa atau Kelurahan harus didampingi oleh pendamping yang selalu mendidik, mengarahkan dan memberdayakan masyarakat fakir miskin dengan merubah *mindset* orang fakir miskin dari mental malas, tidak mau bekerja, atau mental pengemis menjadi mental pekerja keras, mental pengusaha, kreatif, dan inovatif.

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM, pertama dibentuk panitia di tingkat Desa atau Kelurahan, panitia ini bertugas melaksanakan (Pemilu BKM), penjaringan utusan ditingkat basis atau RT, dan melibatkan Ketua RT setempat untuk memilih utusan di tingkat RT 3 orang untuk dicalonkan dan dipilih menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat Desa atau Kelurahan. Panitia Pemilu BKM berkewajiban untuk merekap siapa utusan yang dipilih ditingkat RT menjadi jumlah utusan ditingkat Desa atau Kelurahan. Untuk selanjutnya panitia Pemilu BKM melaksanakan pemilihan anggota BKM dengan cara semua nama utusan yang direkap dan ditempel oleh panitia. Yang berhak dipilih dan memilih diantara nama-nama utusan yang tercantum dalam rekap daftar nama utusan atau calon yang tertempel didepan.

Cara memilih calon BKM yaitu setiap utusan atau calon punya hak memilih 3 orang nama yang berbeda diantara daftar nama calon dan tidak boleh 1 calon atau utusan memilih 3 nama calon yang sama. Sehingga nanti siapa yang namanya terpilih dengan suara terbanyak akan menjadi BKM. Dan sebelum pemilihan anggota BKM

---

<sup>19</sup> Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 187

panitia supaya mengumumkan atau memberitahukan dan wawasan bahwa 1) yang terpilih menjadi anggota BKM tidak dapat gajian, harus ikhlas mencari ridho Allah SWT untuk menanggulangi kemiskinan 2) Mempunyai kepedulian terhadap nasib orang miskin 3) Jujur dalam mengemban amanah 4) Pandai dan kreatif serta inovatif 5) Pinter Kober dan Bender (PKB) 6) Berniat untuk beribadah dalam menanggulangi kemiskinan.

Agar anggota BKM yang terpilih betul-betul orang yang ikhlas mau bekerja dengan niat ibadah mencari ridho Allah SWT. Berdasarkan hasil perolehan diranking, perolehan suara yaitu yang menjadi anggota BKM sekaligus siapa yang memperoleh suaranya yang paling banyak menjadi koordinator BKM dan jumlah anggota BKM atau LKM minimal 9 orang maksimal 12-13 orang, dipilih *ranking* perolehan suara sampai ranking 12-13 orang.

Selanjutnya anggota BKM atau LKM mempunyai tugas dan bekerja sama dengan ketua RT yang ada di Desa atau Kelurahan setempat, dan bekerja sama melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat. Mencari orang miskin di tingkat RT di Desa atau Kelurahan masing-masing, sehingga ketemu dan diketahui secara tepat dan akurat jumlah orang fakir miskin ditingkat RT disepakati di Desa atau Kelurahan. Sebelum melaksanakan pemetaan swadaya masyarakat kriteria yang disepakati sebagai berikut 1) orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak punya pekerjaan tetap 2) orang miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari 3) Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya 4) Orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari 5) Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak punya penghasilan tetap 6) Kebutuhan pokok makan satu hari 1 mut (6 Ons) dan makan daging satu minggu 2 kali, kalau kurang dari itu termasuk miskin (menurut Islam)

Setelah diketahui satu Desa atau Kelurahan jumlah penduduk miskinnya, lalu dikelompokkan orang fakir dan miskin yang masih umur produktif atau mempunyai potensi yang dapat diberdayakan, kemudian dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan potensi yang mereka miliki. Setiap kelompok beranggotakan minimal 3 orang maksimal 5 orang sesuai dengan potensi dan klasifikasi usaha masing-masing atau dikenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Mereka mengelompokkan diri dengan jenis usaha mikro kecil jasa, dll. Dana pinjaman bergulir dikelola oleh Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) yang amanah yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LKM atau BKM) di tingkat desa atau Kelurahan.<sup>20</sup>

Sebelum mereka diberikan pinjaman modal bergulir mereka diberikan tausiyah tentang uang pinjaman dalam Islam, niatan usaha untuk merubah nasib dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengajarkan "Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah" yang maksudnya yang memberi lebih baik daripada orang yang memintaminta itu semua untuk merubah mentalnya orang miskin supaya menjadi mental pekerja, pengusaha, *interpreneurship* agar jadi orang pemberi dermawan. Disamping itu

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, hlm. 12

mereka dipelajari dan dilatih untuk menggunakan uang modal usaha dan manajemen keuangan sederhana itu baru diberikan modal usaha yang dibutuhkan.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin berpendapatan rendah di wilayah Desa atau Kelurahan, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin. Pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ditingkat Desa atau Kelurahan bisa diambil dari dana hibah dari pemerintah, dana dari zakat dan shodaqoh, dermawan yang punya kepedulian, dll.

## **KESIMPULAN**

1. Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan masalah besar bagi umat manusia. Ketidakberdayaan masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan masyarakat karena bidang pendidikan, bidang politik yang tidak mengakses informasi kebijakan yang menyangkut nasib mereka, bidang ekonomi tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, dikalangan masyarakat termarginalkan di lingkungan masyarakat.
2. Umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabatnya kaum fakir miskin. Hal ini banyak peringatan yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an Surat Al Maa'uun ayat 1-3 yang artinya "Tahukah kamu orang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin dan sunnah Rasul SAW. Kefakiran lebih mendekati pada kekufuran, tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang dibawah.
3. Untuk mengangkat harkat dan martabat dan menanggulangi masyarakat fakir dan miskin dengan strategi memberdayakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin. Strategi pertama dengan merubah mindset dari minta-minta menjadi mental pengusaha atau entrepreneurship. Kedua, diberi wawasan dan keterampilan usaha. Ketiga, diberi modal usaha sehingga mereka dapat menggunakan modal usaha dengan baik dan benar.
4. Untuk menanggulangi dan memberdayakan masyarakat fakir dan miskin perlu pendamping yang profesional yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat. Menguasai ajaran agama Islam, entrepreneurship dan lain-lain, yang ikhlas selalu mendampingi masyarakat fakir dan miskin sehingga mampu merubah mindset dan perilaku masyarakat fakir dan miskin

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah*, Pustaka Al-Kautsar
- Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta : Amzah
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir Informasi Dasar Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 2013. TKPS KPK, Jakarta
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo
- Khoiriyah. 2012. *Sosiologi Pendidikan Islam*, Penerbit Teras
- Lubis, Saiful Ahyar. *Konseling Islam*, Jakarta
- Mushaf An-Nadhlah. 2011. *Al Qur'an dan Terjemahan*, PT. Hati Mas.
- Rifa'i, Moh. & Zuhri, Moh. 1978. *Terjemahan Kifayatul Ahyar*, CV Toha Putra
- Salam, Abdul. 2010. *Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*, Surabaya Ciputra, Entrepreneurship
- Subur, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islam*, Yogyakarta: El SAQ Press.
- Suharto, Edi. 2013. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Adi Tama.
- Suryana. 2008. *Kewirausahaan*, Bandung : Salemba Empat.
- Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional